

# Analisis Wacana Kritis Model Michael Foucault dalam Berita Pada tempo.com : "UKT Mahal, DPR Tuding Menteri Pendidikan Nadiem Makarim Lakukan Komersialisasi Pendidikan Tinggi"

Fadilla Arfa Reyza

UIN Walisongo Semarang, Indonesia; 23010680009@student.walisongo.ac.id

**Keywords:** *Critical Discourse, News, Tempo.com.*

## **Abstract**

The problem of increasing the UKT is an ongoing problem and there is still no appropriate solution to deal with this problem. The response from the Ministry of Education, which explicitly suggested that if you do not have the money to pay for UKT, it is better not to go to college, this is surprising. Tempo is one of the media that actively reports on the increase in UKT. Tempo not only describes the news regarding the increase in UKT, but Tempo provides criticism and takes sides regarding the issue of the increase in UKT. This research was conducted to describe the elements of representation, misrepresentation, marginalization and delegitimization in the news discourse text entitled "UKT Mahal, DPR Tuding Menteri Pendidikan Nadiem Makarim Lakukan Komersialisasi Pendidikan Tinggi" on Tempo.com. This research is a qualitative descriptive type of research, using Foucault's critical discourse analysis model. The results of this research explain that knowledge relations are presented to criticize the attitude of the ministry of education regarding impartiality towards the poor. The media ideology openly and boldly criticizes the attitude of the ministry of education which favors the poor in obtaining higher education.

**Kata kunci:** *Wacana Kritis, Berita, Tempo.com.*

## **Abstrak**

Masalah kenaikan UKT adalah masalah yang masih terus berlanjut dan masih belum ada solusi yang tepat untuk mengani masalah ini. Tanggapan dari Kementerian pendidikan yang secara eksplisit menyarankan apabila tidak memiliki biaya untuk membayar UKT maka lebih baik tidak kuliah, ini menjadi suatu hal yang mengejutkan. Tempo sebagai salah satu media yang aktif memberitakan mengenai kenaikan UKT. Tempo tidak hanya mendeskripsikan pemberitaan mengenai kenaikan UKT namun Tempo memberi kertitik dan keberpihakan terkait masalah kenaikan UKT. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan unsur representasi, misrepresentasi, marjinalisasi dan deligitimasi dalam teks wacana berita yang berjudul "UKT Mahal, DPR Tuding Menteri Pendidikan Nadiem Makarim Lakukan Komersialisasi Pendidikan Tinggi" pada Tempo.com. Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan analisis wacana kritis model Foucault. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa relasi pengetahuan yang dihadirkan untuk menkritisi sikap dari kementerian pendidikan atas ketidakberpihakan kepada masyarakat miskin. Ideologi media secara terbuka dan berani untuk mengkritisi sikap dari kementerian pendidikan yang memihak kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi lagi.

**Article history:**  
Received: 15-02-2024  
Revised 13-05-2024  
Accepted 02-08-2024

Corresponding Author: (Author yang komunikasi dengan editor)

Khoirul Anwar

Universitas ABCD, Indonesia; [khoirul@unissula.ac.id](mailto:khoirul@unissula.ac.id)

## PENDAHULUAN

Bahasa merupakan alat komunikasi yang bersifat arbiter dan universal bagi manusia. Bahasa digunakan untuk menyampaikan ide, pikiran, dan perasaan baik melalui lisan maupun tulisan. Kian hari, fungsi bahasa tidak hanya digunakan untuk fungsi komunikasi. Namun bahasa menurut Fairclough memiliki fungsi sebagai media perantara untuk menyampaikan ideologi yang terkait pelaksanaan kekuasaan oleh individu maupun kelompok. Bahasa memiliki kontribusi terhadap proses dominasi. Dominasi apa nantinya yang diinginkan, itu tergantung dari yang menyampaikan komunikasi memiliki kepentingan apa (Andriani, 2024).

Dalam era informasi digital yang semakin berkembang pesat, media massa memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk opini publik dan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap berbagai isu (Sudrajat & Rohida, 2022). Isu yang berkembang belakangan ini adalah kenaikan UKT yang melambung tinggi pada perguruan tinggi negeri yang berkembang belakangan ini menjadi isu yang ramai diperbincangkan pada Masyarakat (Setiawanty, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa media massa memiliki peran dalam pembentukan dominasi isu pendidikan.

Pemberitaan yang ada di media massa adalah salah satu bentuk dari wacana (Santosa, 2017). Salah satu pendekatan analisis yang relevan dalam memahami konstruksi berita media massa adalah analisis wacana kritis model Foucault. Model analisis wacana kritis Foucault dapat disusun berdasarkan tiga elemen kunci, yaitu wacana, sejarah, dan kekuasaan (Dhona, 2020). Model ini menonjolkan pentingnya memahami hubungan antara bahasa (wacana), konteks sejarah, dan dinamika kekuasaan dalam memahami pembentukan dan pengaruh suatu teks atau narasi (Khozin Afandi, 2015).

Dengan latar belakang demikian, maka penelitian ini akan menganalisis sebuah berita dari tempo.com yang berjudul "UKT Mahal, DPR Tuding Menteri Pendidikan Nadiem Makarim Lakukan Komersialisasi Pendidikan Tinggi". Berita ini dipilih karena relevansinya dengan konteks masalah pendidikan di Indonesia saat ini, serta potensi terkandungnya representasi dan narasi tertentu tentang kebijakan pendidikan tinggi yang diambil oleh pemerintah.

Melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis model Foucault, penelitian ini akan mengidentifikasi konstruksi kekuasaan, pengetahuan, dan ideologi yang muncul dalam teks berita tersebut. Hal selanjutnya yang akan didapatkan deskripsi mengenai representasi, misrepresentasi, marjinalisasi dan deligitimasi dalam teks wacana berita tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif eksplanatif. Analisis wacana kritis CDA (Critical Discourse Analysis) dengan menggunakan konten analisis atau content analysis. Sumber data dalam penelitian ini adalah teks berita pada Tempo.com dengan judul "UKT Mahal, DPR Tuding Menteri Pendidikan Nadiem Makarim Lakukan Komersialisasi Pendidikan Tinggi". Hasil dari analisa nantinya mencakup representasi, misrepresentasi, marjinalisasi dan delegitimasi. Teknik pengumpulan data dilakukan

dengan teknik catat dari sumber data, lalu menggunakan instrumen lembar pedoman pencatatan (Ulfah et al., 2022). Data yang sudah terkumpul nantinya akan dianalisis dengan teknis analisis konten dengan tujuan mencapai tujuan analisis yaitu mendeskripsikan unsur representasi, misrepresentasi, marjinalisasi dan delegitimasi (Rahman & Saleh, 2022) dalam teks berita dari Tempo.com dengan judul "UKT Mahal, DPR Tuding Menteri Pendidikan Nadiem Makarim Lakukan Komersialisasi Pendidikan Tinggi".

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Sejarah lahirnya Pos-Struktural**

Pos-struktural adalah upaya deskonstruksi dari konsep sebelumnya yaitu Struktural. Upaya deskonstruksi merupakan suatu tindakan yang radikal karena berani menghancurkan yang sudah tertata rapi, dianggap paling benar dan sudah diagungkan pada masa itu dalam konteks ini adalah strukturalisme. Strukturalisme adalah pandangan yang meyakini adanya sebuah sistem mengatur kehidupan manusia. Sistem merupakan seperangkat bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan. Bagi strukturalisme yang diutamakan adalah memahami struktur dalam yang tidak terjangkau oleh indra manusia, sedangkan fenomena permukaan dan juga makna yang tersembunyi tidak penting. Makna atau kebenaran ditemukan apabila berhubungan dengan struktur atau sistem bahasa yang digunakan (Siregar, 2019).

Suatu tanda mendapat maknanya disebabkan perbedaannya dengan tanda-tanda lain. Tanda adalah segala sesuatu yang mengandung makna, yang mempunyai dua unsur, yaitu penanda (bentuk) dan petanda (makna). Tanda mobil mempunyai makna sebagai alat untuk transportasi yang mempunyai empat roda berbeda dengan sepeda motor atau becak. Tanda mobil, sepeda motor dan becak ditetapkan begitu saja tanpa diketahui mengapa kendaraan empat roda disebut mobil, kendaraan dua roda disebut sepeda motor dan kendaraan tiga roda disebut becak. Penyebutan ini sudah menjadi konvensi sehingga bahasa sebagai sistem tanda bersifat arbitrer. Arbitrer merupakan konsep semiotika yang menyatakan bahwa hubungan antara penanda dan petanda hanya berdasarkan kesepakatan sosial dan bukan hubungan alamiah. Suatu tanda mendapat maknanya karena perbedaannya dengan tanda lain. Apabila penanda dan petanda bersifat arbitrer maka hubungan antar kata, antar kalimat dan seterusnya juga bersifat arbitrer (Siregar, 2019).

Menurut aliran strukturalis, manusia bukan makhluk yang bebas melainkan makhluk yang terikat oleh struktur yang ada. Segala gerak-gerik manusia sudah terikat dengan struktur sehingga manusia ibarat robot yang bergerak sesuai dengan sistem yang mengendalikannya (Amelia et al., 2024). Demikian juga dengan bahasa, kemunculannya bukan dari individu-individu melainkan individu berbahasa sesuai dengan struktur yang sudah ada. Dalam pengertian ini struktur itu seakan-akan pemberian Tuhan dan manusia mengikuti atau menerima pemberian itu. Padahal struktur yang ada diawali

konstruksi dari individu-individu menjadi suatu yang mapan dan diterima secara bersama.

Filsafat modernis mendewakan rasionalis, individualis, dan universalis. Kaum modernis mengagung-agungkan logos dan menjauhkan mitos (Sitorus & Sitorus, 2024). Dengan penguasaan logos, kaum modernis berpandangan kehidupan manusia semakin sempurna. Pandangan ini ditolak oleh kaum post-modernisme dengan alasan: *pertama*, dalam praktiknya, kemajuan-kemajuan yang spektakuler seperti yang diharapkan gagal tercapai; *kedua*, ilmu pengetahuan modern tidak mampu melepaskan diri dari penyalahgunaan otoritas; *ketiga*, ada kontradiksi antara teori dan fakta dalam perkembangan ilmu-ilmu modern; *keempat*, adanya kekeliruan akan anggapan bahwa ilmu pengetahuan modern dapat menyelesaikan segala permasalahan hidup manusia. Dalam kenyataannya, banyak kelaparan, kemiskinan, kerusakan lingkungan akibat turunan dari ilmu pengetahuan dan teknologi; *kelima*, ilmu-ilmu modern mengesampingkan dimensi-dimensi mistis dan metafisik eksistensi manusia disebabkan lebih mementingkan atribut fisik individu (Siregar, 2019).

Derrida sebagai salah satu tokoh dari post-strukturalisme, menginginkan masyarakat bebas dari kekuasaan penguasa intelektual yang menciptakan pemikiran dominan (Hardiono, 2021). Melalui kebebasan yang dimiliki, sehingga semua masyarakat menjadi penulis yang merdeka. Manusia diharapkan selalu menciptakan inovasi-inovasi baru dan selalu memperlakukan kebenaran. Kebenaran tidak harus dibatasi dalam kebenaran tunggal, umum, dan universal melainkan bersifat plural, partikular, dan relatif (Siregar, 2019). Adanya kebenaran yang plural menjadikan suatu kejadian ditafsirkan setiap manusia dengan berbagai tafsiran. Makna akan dimaknai dengan bermacam-macam makna. Tanda tidak selalu berhubungan antara penanda (bentuk) dengan petanda (makna).

Ketidaksetujuan Derrida akan pandangan kaum strukturalisme sangatlah beralasan. Menurut kaum strukturalisme, tanda merupakan kesatuan yang tak dapat dipisahkan dari dua bidang seperti selembar kertas. Bidang pertama sebagai penanda untuk menjelaskan bentuk atau ekspresi, dan bidang yang kedua merupakan petanda, yaitu menjelaskan konsep atau makna. Penanda sifatnya material dan konkrit yaitu wujud bentuk atau ekspresi bahasa, sedangkan petanda sesuatu yang bersifat abstrak dan tidak tertangkap oleh indera yang bertujuan menjelaskan konsep atau makna di balik penanda yang konkrit. Kaum strukturalis melihat tanda itu baku dan tunggal. Orang yang menangis dipastikan karena perasaannya sedih, dan orang yang senyum berartian senang. Dalam kehidupan sehari-hari sering orang menangis bukan karena sedih melainkan karena senang atau terharu.

Contoh yang lain mengenai tanda yaitu warna lampu lalu lintas di perempatan jalan atau sering disebut lampu merah. Warna lampu di perempatan ada tiga yaitu, merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna tersebut mempunyai makna tersendiri sesuai dengan konvensi, merah berhenti, kuning hati-hati, dan hijau jalan kira-kira demikian pengertian masyarakat umumnya tentang rambu lalu lintas yang ada di perempatan

jalan. Dalam pengertian kaum struktural, ketiga tanda itu sudah baku dan tidak boleh diganggu gugat lagi.

Menurut Derrida, penanda (*signifier*) tidak berkaitan langsung dengan petanda (*signified*). Penanda dengan petanda tidak memiliki korespondensi secara langsung. Hal ini sangat bertentangan dengan pendapat Saussure yang menyatakan bahwa penanda berkaitan langsung dengan petanda. Menurut Saussure hubungan antara penanda dan petanda ibarat dua sisi mata uang yang sama. Derrida tidak setuju akan pernyataan ini, menurutnya tanda sebagai struktur perbedaan, sebagian darinya selalu “tidak di sana” sebagian lagi selalu “bukan yang itu”. Penanda dan petanda terus berpisah dan menyatu kembali dengan kombinasi-kombinasi baru. Hal ini dapat dilihat melalui contoh kata (tanda) di kamus. Kata yang ada di kamus merujuk pada tanda lain, dan tanda lain merujuk lagi ke tanda lain, begitu seterusnya. Oleh sebab itu suatu penanda akan terus berubah menjadi suatu petanda, dan sebaliknya suatu petanda akan berubah menjadi suatu penanda. Dengan demikian tidak akan pernah suatu penanda sampai kepada petanda akhir.

Dalam Post Modern ada beberapa tokoh seperti Jean Francois Lyotard dengan konsep Narasi Besar dan Masyarakat Komputerisasi, Michel Foucault dengan konsep Kuasa-Pengetahuan Era Postmodern, Jacques Derrida dengan konsep Dekonstruksi Modernitas, Jean Baudrillard dengan konsep Dunia Simulasi dan Hiperrealitas Postmodern, Fredrich Jameson dengan konsep Kapitalisme Lanjut dan Postmodernisme. Namun pada pembahasan kali ini fokus tokoh yang dibahas adalah Michael Foucault (Hidayat, 2019).

## **B. Sejarah Singkat mengenai Michael Foucault**

Michel Foucault adalah filsuf, sejarawan dan sosiolog kontemporer Perancis. Ia dilahirkan di Poitiers, Perancis pada tanggal 15 Oktober 1926 dengan nama Paul-Michel Foucault, dari sebuah keluarga kaya. Ayahnya, Paul Foucault, adalah seorang dokter bedah terkenal di Perancis pada saat itu. Pendidikan dasarnya diselesaikan di sekolah Katolik, Jesuit Collège Saint-Stanislas dan dilanjutkan ke École Normale Supérieure (rue d'Ulm), sekolah prestisius yang dianggap sebagai pintu masuk karir akademik terbaik di bidang humaniora di Perancis. Foucault sangat dikenal karena karya-karya kritisnya mengenai institusi sosial perifer (pinggiran), penjara, rumah sakit jiwa, kegilaan, ilmu ilmu kemanusiaan, dan sejarah seksualitas (Khozin Afandi, 2015).

Pemikiran Foucault tentang kekuasaan, hubungan kuasa, pengetahuan dan diskursus serta arkeologi pengetahuan banyak diperbincangkan dalam kajian post-strukturalisme. Beberapa karya penting Michel Foucault yang hingga saat ini masih menjadi bahan diskusi di kalangan pemikir ilmu-ilmu sosial diantaranya adalah *Madness and Sanity: History of Madness in the Classical Age* (1961), *The Birth of the Clinic: An Archaeology of Medical Perception* (1963), *The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences* (1966), *The Archaeology of Knowledge* (1969), *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (1975) dan *The History of Sexuality: An Introduction* (1976). Dalam kajian postmodernisme, nama Foucault disejajarkan dengan

pemikir-pemikir postmodern seperti J.F. Lyotard, J. Baudrillard, J. Derrida dan F. Jameson (Hidayat, 2019).

Foucault memulai karir akademik pada tahun 1951 dengan mengajar di *École Normale*. Dari tahun 1953-1954 ia mengajar psikologi di *Université Lille Nord de France*. Tahun 1954 Foucault menjadi duta budaya Perancis dan mengajar di *University of Uppsala*, Swedia. Tahun 1958 Foucault meninggalkan *Uppsala* dan mengajar di *Warsaw University* serta *University of Hamburg*, Jerman. Tahun 1960 Foucault kembali ke Perancis dan mengajar Filsafat di *University of Clermont-Ferrand*. Terakhir Foucault mengajar *Sejarah Sistem Pemikiran* dan menjadi *Rektor Collège de France* (Agustin, 2009).

Foucault mencatat beberapa karakter khas kebudayaan postmodern. Berangkat dari Kant, Foucault bersepakat bahwa Era Pencerahan adalah saat dimana rasio mendapatkan tempat istimewa dalam sejarah perkembangan kebudayaan. Namun ia menolak anggapan Kant bahwa rasio berlaku universal. Baginya rasio hanyalah salah satu cara untuk menanggapi situasi zaman saat itu (Simmel, 2002). Menurutnya terdapat tanggapan lain terhadap Pencerahan seperti diwakili Baudelaire yaitu ironi. Ironi adalah keberanian, yang disertai kegetiran, untuk terlibat secara aktif dengan situasi kini dan disini, historis dan lokal (*locally determined*), tanpa harus mencantolkan diri pada status-status khusus dari kebenaran kebenaran absolut, di luar diri manusia, baik atas nama Tuhan, logos, atau yang lainnya. Ironi juga berarti menjalani kehidupan tanpa dibebani oleh prinsip baku, yang sudah terpatok sebelumnya. Dengan ironi, Foucault menerima keyakinan bahwa sejarah modernitas bukanlah sejarah tunggal, dengan narasi besar yang monolog: rasionalitas. Lebih jauh ia menyingkapkan bahwa narasi-narasi besar modernisme hanyalah mistifikasi yang bersifat ideologis dan semu. Ia misalnya, menolak pandangan para filsuf Pencerahan yang mengatakan bahwa manusia adalah subjek otonom, mandiri dan mampu menentukan dirinya sendiri. Sebaliknya menurut Foucault, manusia modern sebagai subjek ataupun objek sebenarnya tidak lebih dari individu yang lahir dan diciptakan oleh multiplisitas kekuasaan melalui disiplin, normalisasi dan regulasi.

Menurut Foucault, genealogi sejarah adalah konsepsi sejarah yang secara sadar mendelegitimasi masa kini dan memisahkannya dari masa lalu. Tujuannya adalah untuk menghapuskan legitimasi masa kini sehingga dapat menemukan perbedaan khas masa lalu dan masa kini (Oktris et al., 2022). Ketika teknologi kekuasaan masa lalu diuraikan secara rinci, maka asumsi-asumsi masa kini yang memandang masa lalu sebagai "irasional" akan runtuh. Dengan menawarkan konsep genealogi sejarah, Foucault juga sekaligus menolak model sejarah teleologis Hegelian: yakni sejarah yang bergulir mengikuti alur linear maju yang berakhir pada satu tujuan tertentu. Lebih lanjut, menurut Foucault, genealogi berfokus pada pengetahuan lokal yang bersifat diskontinu, remeh-temeh dan yang kerap kali dianggap tidak sah dihadapan klaim teori-teori besar (Hidayat, 2019).

Dalam bukunya *The Archaeology of Knowledge* (1969) Foucault menguraikan hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Foucault menolak pemahaman tentang

kekuasaan yang bersifat negatif, membatasi, menghalangi, melarang. Kekuasaan juga bukan hak milik atau kemampuan. Pola hubungan kekuasaan tidak berasal dari negara atau penguasa (terpusat). Sebaliknya, kekuasaan bersifat positif, menyebar luas kemana-mana. Kekuasaan menciptakan realitas dan wacana pengetahuan serta kebenaran yang baru. Kekuasaan melahirkan pengetahuan baru. Sebaliknya, pengetahuan adalah kekuasaan untuk mendefinisikan yang lain. Pengetahuan menciptakan pengaruh - pengaruh kekuasaan. Tanpa pengetahuan, tidak ada kuasa. Inilah: kuasa-pengetahuan. Menurut Foucault, kekuasaan bukanlah kekuatan, institusi atau struktur yang bersifat menundukkan. Kekuasaan adalah label nominal bagi relasi strategis yang kompleks dalam masyarakat. Ia menyebar dan hadir di mana-mana, dimiliki oleh siapa saja.

### **C. Analisis Wacana Berita dengan Pendekatan Michael Foucault**

Analisis wacana menurut Foucault ditinjau dari kemampuannya menjadi seperangkat wacana yang bertujuan membentuk serta melestarikan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Pada analisis Foucault, menitikberatkan pada hubungan kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Analisis wacana melihat pemakaian bahasa, khususnya dalam berita sebagai praktik sosial yang membentuk pengetahuan (Novianti, 2013).

Pengetahuan memiliki hubungan dengan kekuasaan. Kuasa tidak dimaknai dalam 'kepemilikan' yang merupakan sumber kekuasaan tertentu, melainkan dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup dan banyak posisi saling berkaitan, sifatnya individu. Kekuasaan selalu terakumulasi lewat pengetahuan dan pengetahuan selalu punya efek kuasa (LUBIS, 2015). Penyelenggara kekuasaan dalam konteks ini media selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaan. Kontrol dan pembentukan individu yang patuh dan disiplin adalah wujud kekuasaan yang ada di mana-mana. Melalui wacana, individu bukan hanya didefinisikan, tetapi juga dibentuk, dikontrol, dan disiplinkan.

Pada suatu masyarakat memungkinkan terdapat wacana yang tidak serupa, kemudian kekuasaan memilih dan mendukung wacana tertentu sehingga wacana tersebut menjadi dominan (Gunawan & Abrian, 2024). Sementara itu wacana lainnya menjadi tersingkirkan. Terkait hal tersebut, penelitian ini akan menganalisis konstruksi wacana pemberitaan yang dihadirkan Tempo online yang membahas mengenai kenaikan UKT dengan judul "UKT Mahal DPR Tuding Menteri Pendidikan Nadiem Makarim Lakukan Komersialisasi Pendidikan Tinggi" yang diterbitkan pada hari Minggu, 26 Mei 2024 dengan reporter dan editor Hotma Radja Siregar.

Penelitian ini menekankan pada upaya menelusuri makna yang terdapat dibalik fakta melalui model analisis wacana kritis Foucault. Cara mengkajinya dijabarkan Rustono dan Mardikantoro sebagai berikut:

Title: The [Main] Title Of The Paper

1. Representasi merujuk kepada seseorang, kelompok, gagasan, atau pendapat tertentu ditampilkan dalam pemberitaan. Representasi ditampilkan sebagaimana mestinya atau diburukkan. Dengan kata, kalimat, aksentuasi, dan bantuan foto, kelompok atau gagasan ditampilkandalam pemberitaan kepada khalayak.
2. Misrepresentasi dapat dimaknai ketidakbenaran penggambaran, kesalahan penggambaran. Seseorang, kelompok pendapat, gagasan tidak ditampilkan sebagai mestinya, tetapi digambarkansecara buruk.
3. Marjinalisasi terjadi penggambaran buruk kepada pihak/ kelompok lain tetapi tidak terjadi pemilahan antara pihak A dan pihak B. Dalam aspek ini Foucault menyoroti pula ada beberapa pemakaian bahasa sebagai wacana dari marjinalisasi, danstereotip.
4. Delegitimasi berkaitan denganseseorang atau kelompok dianggap tidak sah.

## 1. Isi Berita

*Cover majalah tempo yang dijadikan gambar pada halaman berita*



**UKT Mahal, DPR Tuding Menteri Pendidikan Nadiem Makarim Lakukan Komersialisasi Pendidikan Tinggi** (*UKT Mahal, DPR Tuding Menteri Pendidikan Nadiem Makarim Lakukan Komersialisasi Pendidikan Tinggi \_ Tempo, n.d.*)

**TEMPO.CO, Jakarta** - "Pendidikan tinggi adalah *tertiary education*, jadi bukan wajib belajar". Sampai di sini, kalimat Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Tjitjik Sri Tjahjandarie bisa kita maklumi. Pernyataannya menjadi problematik ketika ia melanjutkan bahwa, "Tidak seluruhnya lulusan SLTA/SMK itu wajib masuk perguruan tinggi. Itu sifatnya pilihan."

Konteks pernyataan itu tentang uang kuliah tunggal di perguruan tinggi negeri yang mahal. Dengan konteks itu, Ibu Tjitjik hendak menyatakan bahwa orang miskin tak perlu kuliah karena tak bisa membayar biaya sekolah. Bahkan seorang liberal tulen sekalipun, yang berpandangan negara tak usah ikut campur urusan orang kebanyakan, tak akan berbicara seterbuka itu ketika membahas pendidikan.

*Tertiary education* itu isitilah UNESCO dalam penggolongan jenis-jenis pendidikan. Ada pendidikan primer yang mengacu pada pendidikan dasar, ada pendidikan sekunder untuk sekolah menengah, dan pendidikan tersier untuk perguruan tinggi. Penggolongan itu untuk membedakan level pendidikan bagi masyarakat. Jadi, tersier di sana bermakna netral, sebagai penggolongan pendidikan tingkat ketiga.

Ibu Tjitjik memberikan makna yang bias kelas ketika mengatakan arti tersier sebagai pilihan. Apalagi, penjelasannya bersambung ke konteks meruyaknya protes biaya kuliah yang makin mahal di perguruan tinggi negeri. Apalagi, ada pernyataan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim bahwa UKT mahal sebagai wujud keadilan: mahasiswa kaya mensubsidi mahasiswa miskin.

Agaknya, Ibu Tjitjik dan Nadiem Makarim perlu mempelajari lagi untuk apa negara didirikan, untuk apa para pendiri bangsa ini menyusun UUD 1945 sebagai dasar hidup kita bernegara. Di sana disebutkan bahwa negara wajib menyediakan pendidikan yang layak bagi warga negara. Dari pendidikan primer, sekunder, hingga tersier. Karena itu, ada subsidi besar untuk menopangnya.

Pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk mencapai kemajuan. Di awal kemerdekaan, Bung Karno sampai turun tangan mengajari orang banyak membaca dan menulis. Sebab, dengan membaca dan menulis bangsa kita akan terbuka melihat problem dan bisa mencarikan solusi atas masalah hidup sehari-hari. Maka, jika kini para pengurus negara ogah memberikan subsidi untuk pendidikan dan menganjurkan warga negara saling mensubsidi menyelenggarakan pendidikan, ada yang keliru dalam cara mereka berpikir.

Di negara-negara Eropa yang kapitalis sekali pun, kampus tak memberlakukan UKT. Pemerintahnya memandang pendidikan sebagai investasi. Mereka menyalurkan uang pajak untuk mensubsidi pendidikan sehingga biaya sekolah primer, sekunder, hingga tersier terjangkau oleh semua kalangan. Bahkan di Amerika Serikat yang menjadi kiblat kebijakan pendidikan di Indonesia.

Di Amerika Serikat, kampus memang layaknya korporasi, punya bisnis sehingga penyelenggaraan pendidikan bisa mandiri. Di kampus-kampus top Amerika, seperti Harvard yang menjadi almamater Menteri Pendidikan, hanya ada dua golongan mahasiswa: jika tidak pintar, mereka berasal dari keluarga kaya. Tapi, di Amerika Sekali pun, pendidikan tetap ditujukan bagi semua orang. Pemerintah menyediakan kredit pendidikan agar setiap siswa bisa mengenyam pendidikan tinggi. Pemerintahan Joe Biden-Kamala Harris bahkan menghapus tunggakan mahasiswa sebesar Rp 2.686 triliun.

## 2. Analisis Representasi

Representasi adalah gagasan yang menunjukkan bagaimana seseorang, kelompok, gagasan atau pendapat tertentu. Representasi, ditampilkan sebagaimana mestinya atau suatu hal menjadi diburukkan (Sobari & Silviani, 2019). Dengan produksi kata, kalimat, aksentuasi dan bantuan foto macam apa seseorang, kelompok atau gagasan ditampilkan dalam pemberitaan kepada khalayak.

Kutipan	Analisis
<p>“Pendidikan tinggi adalah <i>tertiary education</i>, jadi bukan wajib belajar”.</p>	<p>kalimat ini merupakan ungkapan dari Ibu Tjitjik (Sek. Menteri Pendidikan). Makna dari <i>tertiary education</i> adalah pendidikan tersier. makna yang dipahami tersier sejauh ini adalah sesuatu hal yang mewah, sehingga tidak tertuntut untuk dipenuhi. Padahal unesco mengartikan <i>tertiary education</i> sebagai jenjang pendidikan yang lebih spesialis ketika ingin mempelajari atau mendalami sebuah keahlian. Representasi ini menunjukkan kesalahan dari pola pikir dari Ibu Tjitjik mengenai <i>tertiary education</i>, karena makna yang sesungguhnya dari teriary education merupakan hal yang dianggap penting karena dengan adanya pendidikan tresier akan mendorong pertumbuhan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kemakmuran bersama.</p>
<p>“Tidak seluruhnya lulusan SLTA/SMK itu wajib masuk perguruan tinggi. Itu sifatnya pilihan.”</p>	<p>Tanggapan selanjutnya dari Ibu Tjitjik, bahwa masuk perguruan tinggi adalah hal yang tidak menjadi sebuah kebutuhan karena ini tidak sesuai dengan program wajib belajar 12 tahun UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Namun untuk masuk ke PT adalah pilihan, boleh ia dan boleh tidak.</p>

	Representasi ini kembali menunjukkan bahwa ibu Tjitjik menyarakankan kepada masyarakat, ketika tidak mampu untuk membayar UKT maka lebih baik memiliki untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
--	---

### 3. Analisis Misunpresentasi

Misrepresentasi merupakan ketidak benaran penggambaran, kesalahan dari penggambaran yang dilakukan. Seseorang, kelompok pendapat, gagasan tidak ditampilkan sebagaimana mestinya tetapi digambarkan secara buruk (Laili, 2017). Misrepresentasi dalam teks berita "*UKT Mahal, DPR Tuding Menteri Pendidikan Nadiem Makarim Lakukan Komersialisasi Pendidikan Tinggi*" pada tempo.com mengenai betapa tidak memihaknya pemerintah/ yang diwakili oleh kementerian pendidikan terhadap masyarakat miskin. ini dapat dilihat dari kutipan:

Kutipan	Analisis
Dengan konteks itu, Ibu Tjitjik hendak menyatakan bahwa orang miskin tak perlu kuliah karena tak bisa membayar biaya sekolah. Bahkan seorang liberal tulen sekalipun, yang berpandangan negara tak usah ikut campur urusan orang kebanyakan, tak akan berbicara seterbuka itu ketika membahas pendidikan.	Penulis menyatakan secara gamblang bahwa pernyataan dari Ibu Tjittik yang tidak memihak kepada orang miskin. Dengan pemilihan kata "orang miskin tidak perlu kuliah". Hal tersebut tidak pantas diucapkan karena seorang liberal tulen sekalipun yang memiliki pandangan bahwa pendidikan tidak perlu diatur oleh negara sungkan untuk mengatakan hal tersebut. Namun yang dikatakan oleh bu Tjijik sudah keterlauan Karena ia yang statusnya sebagai Sek.jendral kementerian pendidikan yang dimana beliau mewakili meteri pendidikan, dan berada di negar indonesia yang secara hukum pendidikan di atur dalam UU Pasal 31 UUD 1945 "bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan" Penulis memiliki penggambaran atas ketidakpantasan dari apa yang sudah disampaikan oleh Sek.jendral kementerian pendidikan.
Maka, jika kini para pengurus negara ogah memberikan subsidi untuk pendidikan dan menganjurkan warga negara saling	Penulis memberikan kata ogah, untuk menunjukkan bahwa pemerintah enggan mengurus permasalahan ini, dan menunjukkan bahwa ketika pemerintah yang

menyubsidi menyelenggarakan pendidikan, ada yang keliru dalam cara mereka berpikir.	memiliki konsep subsidi menyelenggarakan pendidikan, merupakan kekeliruan atau hal yang salah dari proses berpikir Menteri Pendidikan.
---	--

#### 4. Analisis Marjinalisasi

Marjinalisasi merupakan penggambaran buruk kepada pihak/ kelompok lain tetapi tidak terjadi pemilahan antara pihak kita dengan pihak mereka. Dalam konteks ini, marjinalisasi melibatkan penggambaran buruk terhadap pihak atau kelompok tertentu tanpa membedakan antara "kita" dan "mereka"(Andriani, 2024). Proses ini tidak selalu mencakup pemilahan atau pemisahan yang jelas antara dua pihak tersebut, tetapi lebih kepada penurunan nilai atau eksklusi terhadap satu kelompok. Berikut Kutipannya :

Kutipan	Analisis
Maka, jika kini para pengurus negara ogah memberikan subsidi untuk pendidikan dan menganjurkan warga negara saling menyubsidi menyelenggarakan pendidikan, ada yang keliru dalam cara mereka berpikir.	Penulis memberikan kata ogah, untuk menunjukkan bahwa pemerintah enggan mengurus permasalahan ini, dan menunjukkan bahwa ketika pemerintah yang memiliki konsep subsidi menyelenggarakan pendidikan, merupakan kekeliruan atau hal yang salah dari proses berpikir Menteri Pendidikan. Bentuk marjinalisasi yang dilakukan adalah dengan menunjukkan bahwa pemerintah enggan untuk memberikan subsidi pendidikan kepada masyarakat miskin.
Di negara-negara Eropa yang kapitalis sekali pun, kampus tak memberlakukan UKT. Pemerintahnya memandang pendidikan sebagai investasi. Mereka menyalurkan uang pajak untuk menyubsidi pendidikan sehingga biaya sekolah primer, sekunder, hingga tersier terjangkau oleh semua kalangan. Bahkan di Amerika Serikat yang menjadi kiblat kebijakan pendidikan di Indonesia.	Penulis menambahkan data bahwa negara eropa yang kapitalis, yang memfokuskan untuk melakukan bisnis dalam sektor apapun, tidak memberlakukan UKT. Ditambahkan data bahwa negara tersebut malah memberikan subsidi untuk pendidikan sehingga sekolah sampai tingkatan yang tinggi menjadi terjangkau. Perbandingan ini dilakukan dengan mengingat negara Indonesia yang tidak menganut ideologi Pancasila dan pendidikan merupakan hal yang diatur dalam aturan negara namun malah cenderung tidak

--	--

## 5. Analisis Delegitimasi

Delegitimasi merupakan bagaimana seseorang atau kelompok dianggap tidak syah (membatalkan, dianggap tidak syah) atau kehilangan legitimasi dalam suatu konteks tertentu. Ini melibatkan pengurangan atau pencabutan status, kepercayaan, atau otoritas yang sebelumnya diakui (Andriani, 2024). Proses ini dapat terjadi melalui berbagai cara dan dapat memiliki dampak yang signifikan pada reputasi dan keberlanjutan seseorang atau kelompok. <sup>1</sup>Berikut Kutipan wacananya :

Kutipan	Analisis
Di kampus-kampus top Amerika, seperti Harvard yang menjadi almamater Menteri Pendidikan, hanya ada dua golongan mahasiswa: jika tidak pintar, mereka berasal dari keluarga kaya. Tapi, di Amerika Sekali pun, pendidikan tetap ditujukan bagi semua orang. Pemerintah menyediakan kredit pendidikan agar setiap siswa bisa mengenyam pendidikan tinggi. Pemerintahan Joe Biden-Kamala Harris bahkan menghapus tunggakan mahasiswa sebesar Rp 2.686 triliun.	Penambahan data yang menunjukkan bahwa menteri pendidikan yang merupakan alumni dari harvard, dan diketahui bahwa harvard tidak memilih siapa yang berhak dan tidak untuk mendapatkan pendidikan. Justru pemerintah memberikan kredit agar semua siswa tetap mendapatkan pendidikan yang tinggi. Hal ini ingin menunjukkan bahwa mengapa menteri pendidikan tidak belajar dari sistem tersebut padahal ia merupakan lulusan dari kampus Harvard. Penulis mengkonstruksi kalimat tersebut untuk menunjukkan penurunan kredibilitas/kepercayaan terhadap menteri pendidikan.

## KESIMPULAN

Dari penjabaran dan analisa yang telah dilakukan, dari tiap variabel maka media ingin memberikan pandangan bahwa sikap dari Kementerian pendidikan, yang disampaikan oleh sekretaris kementerian yaitu Ibu Tjiktit mengenai tanggapan kepada UKT yang terus naik dan sehingga masyarakat miskin tidak bisa melanjutkan ke

---

<sup>1</sup> (Andriani, 2023)

pendidikan dengan jenjang yang lebih tinggi lagi adalah tidak sepatasnya disampaikan.

Relasi pengetahuan yang dihadirkan untuk menkritisi sikap dari kementerian pendidikan atas ketidakberpihakan kepada masyarakat miskin adalah dengan memberikan pengetahuan mengenai makna ternity education yang sebenarnya. Selain itu adanya pemberitahuan pengetahuan mengenai negara liberal yang masih memberikan subsidi terhadap dana untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan sistem kredit yang berlaku di Harvard sebagai bentuk perdulinya pemerintah terhadap pendidikan jenjang yang lebih tinggi. Ideologi media secara terbuka dan berani untuk mengkritisi sikap dari kementerian pendidikan yang memihak kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi lagi.

## REFERENSI ATAU DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, S. (2009). Foucault Dan Komunikasi (Telaah Konstruksi Wacana Dan Kuasa Foucault Dalam Lingkup Ilmu Komunikasi). *Jurnal Ilmu Komunikasi UPNYK*, 7(3), 103061.
- Amelia, H., Syahputra, N. W., Putri, N. R., & Hardiansyah, M. A. (2024). Perilaku Koruptif Dalam Ranah Organisasi: Budaya Manipulatif Organisasi Mahasiswa Intra Kampus. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 227–235.
- Andriani, I. (2024). Analisis Wacana Kritis Model Foucault Dalam Berita “Tangis Goenawan Mohamad Dan Ambisi Kekuasaan Jokowi” Pada Kompas.Com. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2(1), 40–49.
- Dhona, H. R. (2020). Using Foucauldian Discourse Analysis in Communication Studies. *Communication Spectrum*, 9(2020), 189–208.
- Gunawan, G., & Abrian, R. (2024). Intepretasi Struktur Kecemasan masyarakat dalam Podcast ‘Presiden Joko Widodo...’ oleh Raymond Chin Kajian: Analisis Wacana Kritis Van Dijk. *KONASINDO: Konferensi Nasional Mahasiswa Sastra Indonesia*, 1, 882–901.
- Hardiono, H. (2021). Epistemologi Postrukturalisme Objek Pemikiran Islam Abed Al-Jabiri Dan Implikasinya Bagi Ilmu-Ilmu Dan Pemikiran Keislaman. *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 19(1), 110–138. <https://doi.org/10.30631/tjd.v19i1.119>
- Hidayat, M. A. (2019). Menimbang Teori-Teori Sosial Postmodern. *Journal of Urban Sociology*, 2(1), 42–64.
- Khozin Afandi, A. (2015). Konsep Kekuasaan Michel Faucault. *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 2(1), 131. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2012.2.1.131-149>
- Laili, E. N. (2017). DISFEMISME DALAM PERSPEKTIF SEMANTIK, SOSIOLINGUISTIK, DAN ANALISIS WACANA. *Lingua: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra*, 12, 110–118. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:148843028>
- LUBIS, A. (2015). KONSTRUKSI PEMBERITAAN DUGAAN KASUS KORUPSI KEPALA SKK MIGAS. *Communication*, 5(2).
- Novianti, K. (2013). Kebudayaan, Perubahan Sosial, dan Agama dalam Perspektif Antropologi. *Harmoni*, 12(2), 8–20.
- Oktris, lin, Machdar, N., Mulia, H., & Lawe, A. (2022). *Audit Manaiemen: Teori, Prosedur dan Implementasi*.
- Rahman, S., & Saleh, M. (2022). *Studi bahasa kritis: pendekatan wacana Norman Fairclough dalam teks berita: Jariah Publishing*. Jariah Publishing Intermedia.

- Santosa, A. (2017). Peran Media Massa dalam Mencegah Konflik. *Jurnal ASPIKOM*, 3(2), 199–214. <http://www.dewanpers.or.id>
- Setiawanty, I. (2024). Mahasiswa UB Gelar Demo, Tuntut Cabut Kenaikan UKT hingga Ancam Aksi Lebih Besar. In *Tempo.co*.  
<https://nasional.tempo.co/read/1871447/mahasiswa-ub-gelar-demo-tuntut-cabut-kenaikan-ukt-hingga-ancam-aksi-lebih-besar>
- Simmel, G. (2002). *Sosiologi Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Cindelas Pustala Rakyat Cerdas.
- Siregar, M. (2019). Kritik terhadap teori dekonstruksi derrida. *Journal of Urban Sociology*, 2(1), 65–75.
- Sitorus, H. J., & Sitorus, F. K. (2024). Kontribusi Dekonstruksi Terhadap Kritik Konsep Biner Gender Dan Hierarki Patriarkal Dalam Pernikahan Dengan Pemikiran Jacques Derrida. *JKOMDIS : Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial*, 4(2), 405–410. <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v4i2.1679>
- Sobari, T., & Silviani, I. (2019). Representasi perempuan melalui perspektif sara mills dalam media detik. com dan kompas. com. *Lingua Franca: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 3(2), 146–156.
- Sudrajat, T., & Rohida, L. (2022). Efek Media Massa dalam Pembentukan Opini Publik di Masa Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK)*, 2, 519–524.  
<https://mail.pbtv.co.id/index.php/prosiding/article/view/5329%0Ahttps://mail.pbtv.co.id/index.php/prosiding/article/download/5329/2460>
- UKT Mahal, DPR Tuding Menteri Pendidikan Nadiem Makarim Lakukan Komersialisasi Pendidikan Tinggi \_ tempo. (n.d.).
- Ulfah, A. K., Razali, R., Rahman, H., Ghofur, A., Bukhory, U., Wahyuningrum, S. R., Yusup, M., Inderawati, R., & Muqoddam, F. (2022). *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset dan Pengembangan)*. IAIN Madura Press.